

**DUKUNGAN ASIA PACIFIC NETWORK OF SEX WORKERS (APNSW)
MELALUI EMPOWER FOUNDATION TERHADAP PEKERJA SEKS DI
THAILAND UNTUK MENDAPATKAN STATUS SEBAGAI PEKERJA
LEGAL**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S. Sos) Dalam Bidang Hubungan Internasional**



**OLEH:
DWI NURVITA AMALIASARI
NIM I72215012**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2019**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Dwi Nurvita Amaliasari

NIM : 172215012

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Dukungan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW)

melalui *Empower Foundation* terhadap Pekerja Seks di Thailand untuk

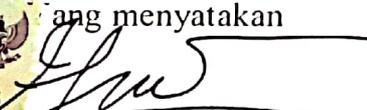
Mendapatkan Status sebagai Pekerja Legal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 11 Juli 2019

Yang menyatakan


Dwi Nurvita Amaliasari
NIM 172215012



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

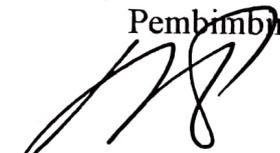
Nama : Dwi Nurvita Amaliasari

NIM : 172215012

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul: **“Dukungan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) melalui *Empower Foundation* terhadap Pekerja Seks di Thailand untuk Mendapatkan Status sebagai Pekerja Legal”**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 11 Juli 2019
Pembimbing



M. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

PENGESAHAN

Skripsi oleh Dwi Nurvita Amaliasari dengan judul: “*Dukungan Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) melalui Empower Foundation terhadap Pekerja Seks di Thailand untuk Mendapatkan Status sebagai Pekerja Legal*” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan tim penguji skripsi pada tanggal 26 Juli 2019.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



M. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Penguji II



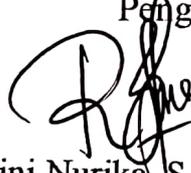
M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A.
NIP 198408232015031002

Penguji III



Zaky Ismail, M.Si.
198212302011011007

Penguji IV



Rizki Rahmadini Nurika, S. Hub.Int., M.A.
NIP 199003252018012001

Surabaya, 26 Juli 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dekan

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil, Ph.D.
NIP 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Nurvita Amaliasari
NIM : I72215012
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : dwinurvitaamaliasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

DUKUNGAN *ASIA PACIFIC NETWORK OF SEX WORKERS* (APNSW) MELALUI

EMPOWER FOUNDATION TERHADAP PEKERJA SEKS DI THAILAND UNTUK

MENDAPATKAN STATUS SEBAGAI PEKERJA LEGAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2019

Penulis



(Dwi Nurvita Amaliasari)

nama terang dan tanda tangan

Thailand dalam menangani *human trafficking*, eksploitasi seks komersial anak, dan ketidakefektifan program pemerintah Thailand dalam rekomendasi *United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP), dengan artian penelitian sebelumnya lebih pada upaya pemberantasan eksploitasi seksual komersial dan perdagangan manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini berangkat dari segala permasalahan pekerja seks, mulai dari diskriminasi hingga stigma pemerintah dan masyarakat yang menyulitkan pekerja seks mendapatkan hak asasi manusia serta pengakuan atas status pekerjaannya, bahkan permasalahan ini tidak hanya terjadi di Thailand saja karena sebagian besar negara di dunia ini juga mengkriminalkan prostitusi. Pekerjaan seks menjadi keputusan bagi sebagian orang, namun sebagian juga ada yang berasal dari korban penipuan dan perdagangan manusia. Segala peraturan dan Undang-undang yang menyerang pekerja seks sebenarnya lebih ditujukan pada perdagangan manusia hanya saja berimbas pada pekerja seks, oleh sebab itu muncullah keinginan pekerja seks agar pekerjaannya diakui sebagai pekerja legal.

Di Thailand pekerja seks memiliki organisasi nasional bernama *Empower Foundation* sebuah *grass root organization* yang membantu pekerja seks untuk mendapatkan hak asasi manusia serta pengakuan atas status pekerja seks, organisasi ini sepenuhnya dikelola oleh pekerja seks, untuk memaksimalkan tujuannya *Empower Foundation* ikut berinteraksi dengan aktor-aktor regional dan internasional, *Empower Foundation* menjadi salah satu anggota pendiri *Asia Pacific Network of Sex*

Pekerja seks sebenarnya mengetahui bahwa pekerjaan seks sangat terlarang, tetapi karena banyak faktor yang menyebabkan harus melakukan pekerjaan tersebut. Faktor-faktor penyebabnya di antaranya adalah pekerja seks tidak dapat membendung hawa nafsu atau bisa dikatakan hiperseks, selanjutnya desakan dari kondisi ekonomi, kurangnya pengetahuan dan keimanan seseorang. Praktek pelacuran merupakan suatu bentuk kemaksiatan yang dapat merusak masyarakat, dampaknya tidak hanya pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan remaja. Berdasarkan pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) patologi sosial adalah ilmu tentang penyakit masyarakat. Sedangkan berdasarkan penelitian oleh Nasrullah Khumaeral yang berjudul patologi sosial pekerja seks komersial (PSK) perspektif Al-Qur'an tertulis bahwa Patologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Sedangkan menurut bahasa, patologi sosial adalah sebuah tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas keluarga, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.⁵⁷ Penyakit masyarakat diawali dari adanya perilaku pribadi yang menyimpang atau individu sosiopatik dengan tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum hal ini merupakan produk dari proses diferensiasi, individualisasi, dan sosialisasi.

⁵⁷ Nasrullah Khumaerah. 2017. *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur'an*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1adCqS8ud5sJ:journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Khitabah/article/download/2922/2798+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>. (diakses pada 30 Juli 2019).

penelitian, fokus penelitian, tinjauan pustaka, landasan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan kerangka teoritik, teori yang dipilih relevan dengan penelitian, peneliti menggunakan teori liberalisme institusional, teori ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami alur pemikiran peneliti dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Peneliti juga memaparkan kajian sejarah dan perkembangan industri seks di Thailand, kajian status pekerja seks di Thailand, kejahatan yang dialami oleh pekerja seks di Thailand, kajian *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dan kajian *Empower Foundation*. Kemudian diakhir pembahasan peneliti memaparkan teori liberalisme institusional milik Joseph Nye. JR. dan Robert O. Keohane.

Bab III berisikan metode penelitian, bab ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam proses melakukan penelitian, yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahap-tahap penelitian, subyek penelitian dan tingkat analisa, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV berisikan penyajian dan analisis data, bab ini menjelaskan tentang pembahasan penelitian, menjabarkan temuan data-data terkait dukungan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) melalui *Empower Foundation* terhadap pekerja seks di Thailand untuk mendapatkan status sebagai pekerja legal. Serta analisis

migran dari Laos, awalnya mereka memang tidak memiliki rencana pekerjaan yang akan dilakukan sehingga mereka menerima pekerjaan apapun yang ada di Thailand meskipun terjun ke dalam industri seks.⁷¹

Seiring berjalannya waktu permintaan jasa layanan seksual tidak hanya berasal dari dalam negeri, namun juga luar negara. Prostitusi masuk sebagai bagian dari industri hiburan. Pendiri *Empower Foundation* yakni Mrs. Chantawipa Apisuk, mengatakan bahwa prostitusi di Thailand masih berkembang meskipun berstatus ilegal dan diatur Undang-undang, dibandingkan dengan negara lain di Asia, Thailand adalah negara yang aman bagi perkembangan industri seks. Pada abad ke-20, prostitusi berkembang menjadi industri yang memberikan keuntungan ekonomi bagi negara.⁷² Di Thailand daerah pusat pengembangan industri seks disebut dengan *Red Light District* yakni daerah tempat industri seks tumbuh dan berkembang seperti Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Koh Samui, dan Phuket, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bangkok

Di Bangkok ini terdapat beberapa tempat *red light district* yaitu Patpong, Soi Cowboy, dan Nana.⁷³

⁷¹ Martha Mensendiek. *Women, migration and prostitution in Thailand*. International Social Work (SAGE, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), Vol. 40, 163-176 (0020-8720; 1997/04). (Japan: Doshisha University). 164.

⁷² Ashley, Mason. 2011. *Tourism and the sex trade in Southeast Asia. Totem: The University of Western Ontario Journal of Anthropology*. Volume 7, Issue 1, article 7. University of Western Ontario.

⁷³ *Bangkok red light areas*. <https://www.mojosons.com>. (diakses pada 30 Mei 2019).

seksual, karena sebagian pekerja seks juga bekerja di tempat hiburan seperti bar, tempat karaoke, restoran, panti pijat, dan rumah bordil. Semua pekerja seks mendapatkan bayaran tunai, tetapi semua juga tergantung pada kebijakan pemilik tempat bekerja, pekerjaan seks mendapatkan bayaran lebih banyak dari pekerjaan lain seperti penjahit dan pembantu rumah tangga. Penghasilan dari pekerja seks berasal dari penjualan minuman beralkohol, layanan pijat atau mandi, dan bayaran pelanggan untuk pekerja juga pihak industri yang biasa di sebut dengan *bar fine* atau bayaran untuk layanan seksual.⁷⁸

Industri seks Thailand memberikan beragam pilihan layanan jasa seksual meliputi wanita, laki-laki, anak-anak, dan *Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender* (LGBT). Wanita adalah makhluk biopsikososial kultural dan spiritual yang utuh dan unik, mempunyai kebutuhan dasar yang beragam sesuai dengan tingkat perkembangannya, keberadaan wanita baik jasmani, rohani serta sosial sangat diperlukan.⁷⁹ Pekerja seks laki-laki sama dengan seorang pekerja seks perempuan yang memberikan jasa layanan seksual dengan imbalan bayaran, selanjutnya pekerja seks anak yaitu seorang yang telah dipekerjakan dalam bidang seksual pada usia anak, definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam kandungan.⁸⁰

⁷⁸ Martha Mensendiek. *Women, migration and prostitution in Thailand*. 165.

⁷⁹ Alimul, A. Aziz, 2006. *Pengantar kebutuhan dasar manusia*, (Jakarta: Salemba Medika). 30.

⁸⁰ Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (Jakarta : Visimedia, 2007),

kewajiban yang harus dilakukan terhadap orang lain atau semua orang. Batas hak asasi manusia yang satu adalah hak asasi orang lain.⁹⁹

Dalam Islam terdapat tiga hak asasi manusia yang meliputi: *Pertama*, hak dasar sesuatu yang dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga kehilangan eksistensinya, bahkan hilang harkat manusianya. *Kedua*, hak sekunder yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasar sebagai manusia. *Ketiga*, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.¹⁰⁰

Konsepsi tentang hak asasi manusia dalam Islam dapat dijumpai dalam sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun pelaksanaannya atau implementasinya dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan Sunnah. Beberapa hak asasi manusia dalam Islam yang meliputi hak hidup, hak keadilan, kebebasan berfikir dan berpendapat, dan hak bekerja.¹⁰¹

a) Hak Hidup

Hak hidup adalah hak asasi paling fundamental bagi setiap manusia, karena kehidupan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak-hak asasi

⁹⁹ Fahrudin Ahmad. *HAM dalam pandangan islam*. https://www.academia.edu/17217008/HAM_dalam_pandangan_Islam. (diakses pada 7 Agustus 2019).

¹⁰⁰ Rifai Shodiq Fathoni. 2017. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. <https://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>. (diakses pada 7 Agustus 2019).

¹⁰¹ Fahrudin Ahmad. *HAM dalam pandangan islam*. https://www.academia.edu/17217008/HAM_dalam_pandangan_Islam. (diakses pada 7 Agustus 2019).

Kedua, *Hifdhun nafs wal 'irdh* jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Ketiga, *Hifdhul 'aql* adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Keempat, *Hifdhun nasl* adalah jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zinah menurut syara', homoseksual adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdh al-nasl*.

Kelima, *Hifdhul mâl* dimaksudkan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua umat manusia tanpa memilih. Islam meletakkan manusia pada posisi sangat mulia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk paling sempurna dan harus dimuliakan. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam islam tidak lain merupakan tuntutan dari ajaran islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluknya. Menurut Abu A'la al-Maududi hak asasi manusia adalah hak kodrati

Empower Foundation adalah lembaga pemberdayaan milik pekerja seks di Thailand yang didirikan pada tahun 1985. Berawal dari proyek yang dilakukan oleh Mrs. Chantawipa Apisuk untuk menelusuri segala hal terkait industri seks, pariwisata seks, dan permasalahan eksploitasi di industri seks di Thailand. Mrs Chantawipa Apisuk mendirikan organisasi *Empower Foundation* bersama pekerja seks di Patpong, Bangkok. Lebih tepatnya *Empower Foundation* adalah organisasi yang menawarkan dukungan kepada pekerja seks wanita di Thailand.¹¹¹

Ketertarikan Mrs. Chantawipa Apisuk pada pekerja seks hingga mendirikan *Empower Foundation* berawal dari pengalamannya sekita tahun 70-an, Mrs. Chantawipa Apisuk sering mendapatkan pertanyaan terkait prostitusi di Thailand, narkoba, dan perdagangan seks oleh petugas Bea Cukai. Mrs. Chantawipa Apisuk pernah belajar di Boston College Chestnut Hill, Massachusetts, United State, dari sini Mrs. Chantawipa Apisuk mendapatkan banyak teman asing sebagian dari temannya mengunjungi Patpong di Bangkok yakni salah satu *Red Light District* Thailand. Dari situ Mrs. Chantawipa Apisuk sering mengunjungi Patpong dan mulai berteman dengan pekerja seks, dari berbagai permasalahan pekerja seks Mrs. Chantawipa Apisuk bertujuan untuk membantu pekerja seks memperbaiki kondisi hidup melalui program-program seperti kelas bahasa Inggris.

¹¹¹ Under the ropes. 2016. *Empowering sex workers: Bangkok's sex work museum*. <https://www.undertheropes.com>. (diakses pada 30 Mei 2019).

mendapatkan respon baik sehingga informasi terus dikelola, dilakukan pembaharuan konten, dan dicetak untuk disebar luaskan. Pada tahun 1990, *Empower Foundation* memperluas fokusnya menjangkau hingga Thailand Utara, kemudian membuka kantor keduanya di Chiang Mai dan melibatkan sebagian besar pekerja seks migran dari Burma. Pekerja seks dari Empower's Chiang Mai memiliki komitmen yang kuat untuk mengadvokasi hak-hak pekerja seks migran dan diakui secara internasional untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan terkait dengan tantangan kebijakan anti perdagangan manusia, yang implementasinya telah memiliki dampak buruk terhadap pekerja seks. Sedangkan kantor *Empower Foundation* di Nonthaburi, Bangkok didirikan pada tahun 1993 sebagai ruang seni komunitas, termasuk museum *Empower Foundation*, yang mengarsipkan sejarah advokasi dan aktivisme pekerja seks.¹¹⁵

Akhirnya kemitraan ini terjalin dan menguat hingga bertahun-tahun, *Empower Foundation* telah menjadi pusat pertukaran, advokasi, dan dukungan kepada para pekerja seks komersial. Pemberdayaan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan para pekerja seks seperti pentingnya akses informasi, pembelajaran untuk membela diskriminasi dalam pekerjaan, dan penyuluhan tentang penyakit HIV, serta meluncurkan bulletin yang bernama *Naam Chewit*, mendirikan pusat sumber daya untuk memberikan informasi pencegahan penularan penyakit terkait berhubungan seksual. Saat ini *Empower Foundation* telah memiliki banyak kantor yang tersebar

¹¹⁵ Julia Davis. 2016. *Sex workers of Empower gather to propose solution to State violence and exploitation of sex workers: Decriminalise Now!*. International Day to End Violence against Sex Workers Day. 6.

pekerja seks bioskop. Satu peserta diidentifikasi sebagai heteroseksual, tetapi bekerja dengan pria dan wanita. Yang lain melaporkan bahwa mereka sebelumnya berusaha untuk beralih dari pria ke perempuan, tetapi kemudian memutuskan untuk menghentikan proses karena kehidupan di Thailand sangat sulit dilakukan oleh orang transgender, mereka sekarang mengidentifikasi sebagai femme gay.

Ketika ditanya apa yang akan membuat pekerjaan mereka lebih menguntungkan, beberapa peserta menyebutkan pentingnya mengetahui beberapa bahasa (Prancis, Jerman, Bahasa Inggris, Jepang, dan Italia) untuk berkomunikasi dengan klien dan membuatnya mendapatkan uang lebih. Peserta melaporkan bahwa satu tantangan utama untuk pekerjaan mereka adalah klien menggunakan papan internet untuk meninjau layanan seksual yang disediakan oleh jenis kelamin pekerja laki-laki. Di komunitas transgender, orang hidup bersama dan berbagi banyak hal dengan masing-masing lainnya, termasuk makeup, pakaian, dan uang jika perlu. Peserta memiliki pengalaman yang beragam dengan tabungan. Salah satu peserta mengatakan bahwa dia menghabiskan uang begitu dia berhasil, pada berbagai item seperti sepeda motor, jam tangan, pakaian, dan obat-obatan. Dia merasa bahwa jika dia membutuhkan uang darurat, dia punya teman yang akan membantunya. Lainnya melaporkan menyimpan jumlah yang ditetapkan setiap bulan di akun bank.

Banyak orang melaporkan bahwa keluarga memainkan peran penting dalam keuangan pribadi mereka. Beberapa peserta mengatakan bahwa mereka mengirim uang ke rumah untuk keluarga mereka kapan mereka bisa. Orang yang sama

mengatakan bahwa mereka juga mengharapkan keluarga mereka untuk mengirimi mereka uang ketika mereka membutuhkannya. Peserta melakukan diskusi kelompok terarah melaporkan sejumlah keinginan setelah mereka keluar dari hubungan kerja seks. Ada juga yang ingin membuka toko bunga, mencatat bahwa itu adalah anggota *Service Workers in Group Foundation* (SWING) telah membuka studionya sendiri. Peserta lain mengatakan bahwa pekerja seks harus bisa akses beberapa jenis asuransi selama dua hingga tiga bulan setelah mereka selesai bekerja. Mereka juga harus memiliki akses ke kumpulan uang yang lebih besar untuk membantu mereka memulai bisnis mereka sendiri. Beberapa peserta mendiskusikan opsi orang lain merawat mereka sebagai jalan keluar dari pekerjaan seks, atau sebagai cara untuk hidup nyaman sebagai pekerja seks.

Beberapa cara yang dapat dilakukan pekerja seks untuk menjadikan yang terbaik dari pekerjaan yang buruk, memaksimalkan pendapatan pekerja seks, dan mencapai ekonomi pemberdayaan. Koperasi usaha di Kolkata, India sebagai inspirasi untuk peluang perbankan dan kredit untuk pekerja seks, sementara CLS WNU di Kamboja menyoroti perlunya dan nilai bantuan hukum yang berfokus pada pekerja seks. WNU juga berfungsi sebagai model untuk memerangi stigma dan diskriminasi untuk generasi pekerja seks berikutnya, dalam program sekolah informal untuk anak-anak pekerja seks. *Ayee Myanmar Association* (AMA), di Myanmar, berfungsi sebagai model inspirasional yang lebih muda, organisasi yang dipimpin pekerja seks yang semakin berkembang dalam ukuran dan kekuatannya mempromosikan hak-hak

ekonomi dan sosial pekerja seks. *Veshya AIDS Muquabala Parishad* (VAMP) di Sangli, India menunjukkan model pemberdayaan diri untuk mengurangi kekerasan dan melawan kriminalisasi menjadikan pekerjaan seks sebagai pilihan penghasilan yang lebih aman. Di Indonesia, *Organisasi Perubahan Sosial Indonesia* (OPSI) dan KDS Melati melayani sebagai contoh kelompok kerja seks menuju pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial di lingkungan yang sangat bermusuhan. Thailand memiliki *Service Workers in Group Foundation* (SWING) berfungsi sebagai model untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk pria dan pekerja seks transgender, sedangkan Can Do Bar yakni sebuah bar yang di kelola oleh *Empower Foundation* telah menciptakan sebuah model ekonomi inovatif sebagai alternatif dari keadaan tetap dan peran *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) menyatukan pekerja seks dan organisasi di seluruh wilayah.¹⁵¹

Tantangan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) sebagai jaringan pekerja seks regional adalah menyadari resiko pekerja seks di setiap negara seperti stigma dan diskriminasi dikarenakan pekerjaan ini melanggar nilai-nilai kehormatan masyarakat, akhirnya *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) tertantang dengan beberapa peraturan dan Undang-undang yang telah dibuat oleh pembuat kebijakan. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) terlibat dalam campuran advokasi kebijakan proaktif dan aktif untuk mendukung hak asasi manusia dan aktif dalam pendekatan berbasis pencegahan HIV.

¹⁵¹ NSWP. 2014. *Sex Workers Demonstrate Economic and Social Empowerment*. https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SUSO%20Asia%20Pacific%20Report_Oct2014.pdf. (diakses pada 7 Agustus 2019).

selanjutnya *Global Network of Sex Work Projects* (NSWP) dan *World Health Organization* (WHO) menyatukan banyak perwakilan pekerja seks dari seluruh dunia untuk berdiskusi dengan para ahli yang akhirnya membuat kebijakan tentang *Sex Workers Implementation Tool* (SWIT),¹⁵⁷ dirilis pada November tahun 2013 di *International Congress on AIDS in Asia and the Pacific* (ICAAP) di Bangkok, Thailand, berisi pendekatan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) untuk literasi perawatan pekerja seks. *Sex Workers Implementation Tool* dianggap sebagai dokumen revolusioner karena menyoroti pentingnya kolektivisasi dan politisasi sebagai bagian dari alat terbaik untuk mobilisasi masyarakat dalam memahami kondisi pekerja seks.

Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) bersama anggota dan mitranya melakukan advokasi membawa suara pekerja seks ke jantung internasional, diskusi hukum, kebijakan regional, dan nasional. Pada tahun 2012 *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) menyelenggarakan pertemuan *Global Fund's New Funding Mechanism* (NFM), yang melibatkan perwakilan dari semua jaringan regional untuk berdiskusi mengenai perbaikan model program baru. Ketika Global Fund sedang meluncurkan program *New Funding Modality* (NFM), *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) ikut memberikan pengarahan kepada anggotanya terkait hal tersebut. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) juga memiliki platform jejaring sosial yang digunakan untuk berbagi informasi dengan jaringannya

¹⁵⁷ NSWP. 2012. *UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work and Annexes 2012*. <http://www.nswp.org/resource/unaidsguidance-notehiv-and-sex-work-and-annexes-2012>. (diakses pada 28 Juni 2019).

dan di luar. Kolaborasi, pelatihan, dan pengembangan keterampilan di antara anggota adalah kunci strategi *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW). Selain itu juga mengadakan lokakarya dan pelatihan tentang hak asasi manusia, dengan teknik advokasi yang berbasis seni.

Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) telah melakukan dan memfasilitasi banyak pelatihan nasional dan regional tentang pekerjaan seks, perdagangan manusia, perawatan literasi, dan advokasi termasuk penggunaan teknologi informasi. Organisasi pekerja seks datang dari berbagai jenis kelamin, *Asia Pacific Transgender Network* (APTN) secara aktif mendapatkan dukungan dari *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW). Pada tahun 2012, *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) bekerjasama dengan *Global Network of Sex Work Projects* (NSWP) dan *Asia Pacific Network +* untuk meluncurkan *Asia Pacific Network of Sex Workers +* merupakan inisiatif untuk menangani masalah bagi pekerja seks yang hidup dengan HIV.

Solidaritas pekerja seks sangat kuat, dengan puluhan ribu pekerja seks di wilayah Asia Pasifik, kekuatan ini dimanfaatkan oleh *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) untuk menantang pihak berwenang yang telah menerapkan Undang-undang anti perdagangan manusia, dan untuk mendapatkan kekuatan membawa masalah pekerja seks menjadi perhatian internasional. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) menyediakan platform penting bagi puluhan ribu pekerja seks di seluruh regional Asia Pasifik untuk bekerja dalam solidaritas antar

kebijakan, *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) sekarang menjadi bagian dari *Interagency Dialogue on Trafficking Towards a Harmonised UN Position*. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) telah melakukan advokasi dengan *UN Women* untuk menempatkan kekerasan terhadap pekerja seks dalam daftar prioritas. Hasilnya Direktur regional *UN Women* telah menyatakan minatnya untuk menangani masalah tersebut. Dengan memasukkan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dalam tim tugas antar lembaga Asia Pasifik untuk perempuan, anak perempuan, kesetaraan gender, dan HIV. Perwakilan pekerja seks juga diundang untuk berbicara di acara Hari Perempuan Internasional yang diadakan PBB di Bangkok pada tahun 2013.¹⁵⁹

Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) menjadi koordinator *Sex Workers Freedom Festival* pada bulan Juli tahun 2012 di India, yakni sebuah festival yang melibatkan 140 pekerja seks internasional dan 800 pekerja seks asal India, festival ini menghabiskan biaya sebesar US \$ 490.000, kegiatan ini juga di filmkan dan diputar dalam konferensi AIDS internasional (IAC) di Washington, DC, karena Festival ini merupakan peristiwa penting yakni pertemuan terbesar pekerja seks secara global, mengusung pesan penting tentang inklusi pekerja seks dalam respon HIV. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) memimpin pada bagian masalah pekerja seks yang hidup dengan HIV dan mampu membawa bersama 20 pekerja seks yang hidup dengan HIV dari wilayah Asia Pasifik. Staf *Asia Pacific*

¹⁵⁹APNSW. 2012. *APNSW+ and NSWP+ Launched at SWFF*, <http://apnsw.wordpress.com/2012/11/02/apnsw-and-nswp-launched-at-swff/>. (diakses pada 27 Juni 2019).

yang hidup dengan HIV. Meskipun merupakan kelompok terbesar yang paling rentan terhadap HIV dan tujuan pelanggaran hak asasi manusia, solidaritas pekerja seks tidak seperti anggota jaringan lain, pekerja seks hampir tidak mungkin mendapatkan pendanaan berkelanjutan, disebabkan oleh persepsi dan prasangka yang keliru tentang kapasitas mereka. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dan anggotanya sering ditantang tentang sejauh mana mereka mewakili pekerja seks, atau dituduh mempromosikan pelecehan dengan mengkomunikasikan *sex work is work*.

Keanggotaan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) semakin inklusif, namun pendanaan organisasi tetap pada titik krisis. Di tahun 2013 *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) berkomitmen bersama staf, anggota, dan sekutu di kawasan untuk setiap pribadi bersedia berkontribusi uang, waktu, dan sumber daya. *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) sangat konsisten dalam melakukan advokasi, menjalin aliansi, dan memahami masalah hak-hak pekerja seks. *Assosiation for Women's Rights in Development* (AWID) adalah hasil dari menjalin aliansi bersama aktivis feminis yang membuat *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dianugerahi beasiswa untuk 20 pekerja seks berpartisipasi dalam Forum Internasional, diadakan di Istanbul, Turki, pada bulan April tahun 2012. Ketua *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) sekaligus pendiri *Aye Myanmar Association* (AMA) bernama Mrs. Kay Thi Win mengisi acara sidang pleno yang dihadiri 2.000 pekerja seks, Mrs. Kay Thi Win menyampaikan wawasan terkait

pembangunan feminis. Pada Januari tahun 2013, Kay Thi Win dipilih sebagai dewan *Association for Women's Rights in Development (AWID)*.¹⁶¹

Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW) terus menjalin hubungan dengan PBB, tentang penempatan masalah hak pekerja seks dalam agenda gerakan perempuan. Bersama dengan jalinan hubungan antara *Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)* dan PBB, maka diharapkan dapat membantu mewujudkan pengakuan atas pekerjaan seks. Gabungan dari kelompok pekerja seks, kelompok aktivis perempuan, dan kelompok anti-perdagangan manusia mendukung pembentukan petisi *Equality Now* dengan pendekatan PBB berdasarkan kesehatan dan hak asasi manusia, selain itu *Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)* juga mengintegrasikan advokasi pengobatan HIV. *Sex Workers Freedom Festival* dan *Asia Pacific Network of Sex Workers +* meluncurkan deklarasi tentang hak-hak pekerja seks yang hidup dengan HIV, difokuskan pada pencegahan, perawatan, serta dukungan sebagai bagian dari inisiatif global, berbasis di Bangkok bersama sekretariat *Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)*. Saat ini *Asia Pacific Network of Sex Workers +* sedang mengembangkan situs web untuk mempromosikan kesehatan terutama tentang HIV kepada seluruh masyarakat dan akses perawatan untuk pekerja seks terkena HIV. APNSW juga bekerja untuk mengintegrasikan pekerja seks yang bermasalah dengan HIV memfasilitasi pelatihan advokasi bersama

¹⁶¹ APNSW. 2013. *Sex Worker Elected to the International Board of AWID for the First Time Ever*, <http://apnsw.wordpress.com/2013/01/31/sex-worker-elected-to-the-international-board-of-awid-for-the-first-time-ever/>. (diakses pada 27 Juni 2019).

huruf, selanjutnya pembelajaran bahasa, *Empower Foundation* dibentuk awalnya hanya menawarkan keterampilan bahasa inggris kepada para pekerja seks, sebaliknya Mrs. Chantawipa Apisuk selaku pendiri *Empower Foundation* mendapatkan kesempatan untuk belajar dari pekerja seks bagaimana masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya, pembelajaran bahasa ini bermanfaat untuk pekerja seks berinteraksi dengan turis. Program bahasa inggris awalnya dikoordinasi oleh *Empower Foundation* di Bar Patpong, Bangkok, seiring berjalannya waktu permintaan kelas bahasa Inggris khusus untuk pekerja seks mengalami peningkatan, akhirnya Mrs. Chantawipa Apisuk selaku pendiri *Empower Foundation* menyewa tempat untuk membuka kelas. Dari kelas-kelas bahasa ini, Mrs. Chantawipa Apisuk selaku pendiri *Empower Foundation* bersama pekerja seks membentuk *Moolniti Songserm Okard Pooying* yakni pendidikan pemberdayaan perempuan. Pembelajaran selanjutnya yakni keterampilan, *Empower Foundation* memberikan pembelajaran seperti menjahit dan kerajinan tangan lainnya, yang mana nantinya akan dijual untuk menambah pendapatan pekerja seks.

Dukungan *Empower Foundation* dari segi kesehatan yakni mengajarkan masyarakat dan penyedia kesehatan tentang mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam bekerja. Pekerja seks juga berbagi pengetahuan terkait kesehatan, dengan cara mengadakan diskusi. Proyek kesehatan utama *Empower Foundation* berkonsentrasi pada akses pengetahuan dan layanan kesehatan khususnya HIV. *Empower Foundation* memproduksi sumber daya informasi pertama di Thailand

Pengunjung museum sangat beragam mulai dari orang-orang media, aktivis, mahasiswa dari seluruh dunia. Kebanyakan tujuan datang ke museum ingin mengetahui tentang kemanusiaan, dikarenakan *This is Us* museum menceritakan kisah unik yakni tentang sejarah prostitusi Thailand.

Mrs. Chantawipa Apisuk mengatakan kepada Myanmar Times bahwa benda-benda di dalam museum, telah dikumpulkan selama 30 tahun oleh *Empower Foundation*. Museum ini menghidupkan sejarah pekerja seks dan keterampilan serta budaya pekerja seks.¹⁶⁷ Dari penjelasan beberapa sumber, mulai pintu masuk museum pengunjung akan melihat buangan dari mesin-mesin jahit yang menggambarkan pekerja seks menolak proyek penyelamatan yang mengajarkan keterampilan tekstil kepada pekerja seks. Bahkan logo *Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)* tertulis *Don't talk to me about sewing machines, talk to me about workers rights*, kalimat ini mencerminkan sentimen oleh pekerja seks di wilayah Asia Pasifik. Advokasi dari *Empower Foundation* menggunakan metode seni seperti teater dan boneka kumjing, untuk mengirim pesan perjalanan pekerja seks kepada masyarakat dunia melalui seni.

¹⁶⁷APNSW. 2016. *This Is Us Sex Work Museum Opens in Bangkok, Thailand*. <https://apnsw.info/2016/08/22/this-is-us-sex-work-museum-opens-in-Bangkok-Thailand/>. (diakses pada 3 Juli 2019).

memberikan bantuan dan pengetahuan mendasar kepada pekerja seks. Pada awal berdiri, banyak pertanyaan yang datang tentang alasan mengapa mendukung pekerja seks dan mengajarkan bahasa Inggris kepada pekerja seks, melihat dari organisasi yang lebih dulu tumbuh seperti *Asosiasi Urologi Amerika (AUA)* dan *British Council*, *Empower Foundation* mempercayai bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia.

Meskipun tidak mendapatkan pengakuan atas status pekerjaan, pekerja seks selama ini tidak mengalami perubahan kondisi, setiap pekerja seks yang pensiun akan digantikan dengan pekerja yang baru, bahkan generasi baru kebanyakan memiliki pekerjaan ganda sesuai keahliannya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk kehidupan lebih baik. Selain untuk menghidupi keluarga pendapatan dari pekerja seks juga digunakan sebagai modal bisnis baru.

Sedangkan di Chiang Mai, *Empower Foundation* mendirikan *Can Do Bar* yakni sebuah bar yang sepenuhnya dikelola anggota *Empower Foundation*. *Can Do Bar* berbeda dengan bar lainnya, *Can Do Bar* satu-satunya di dunia bar yang aman bagi pekerja seks, daya tarik utama *Can Do Bar* bukan menjual seks tetapi memberikan contoh kepada publik untuk menciptakan tempat yang aman bagi pekerja seks serta memperjuangkan martabat pekerja seks.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Wawancara yang dilakukan oleh pihak office Can Do Bar yaitu bar yang dikelola oleh *Empower Foundation* di Thailand, wawancara melalui Massanger Facebook pada 27 Juni 2019. https://drive.google.com/open?id=1wiJ21K2jsTWRXsLDAKCG_JCncivnCijj.

industri seks melakukan tindakan eksploitasi seksual dan akan berujung pada perdagangan manusia, maka pemerintah Thailand semakin mendapatkan desakan dari masyarakat internasional untuk melakukan tindakan terkait hal tersebut.¹⁷⁰

Dari stigma, kekerasan, dan diskriminasi yang menimpa pekerja seks, hal ini semakin menguatkan pekerja seks dengan memunculkan *non-governmental organization*, menghubungkan jaringan hingga melampaui batas negara. Organisasi muncul sebagai jawaban atas keinginan pekerja seks mendapatkan pengakuan dan perlindungan. *Non-governmental organization* bernama *Empower Foundation* dan *Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW)* muncul untuk mengatasi konflik yang dialami pekerja seks di Thailand terkait stigma dan diskriminasi yang datang dari pemerintah hingga masyarakat, menganggap pekerja seks sebagai patologi sosial atau sebuah penyakit masyarakat, pelacur digolongkan dalam tindakan kriminal yang setiap permasalahannya harus ditangani secara hukum, manusia tidak bermoral, dan sumber penyakit berbahaya. Munculnya *non-governmental organization* ini untuk memberikan jalan keluar bagi pekerja seks yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik.

Pihak pemerintah Thailand juga memberikan tindakan memerangi bagi pekerja seks, namun tidak mendapatkan respon baik dari pekerja seks, karena bentuk dari tindakan penyelamatan berupa penggerebekan, penangkapan, dan penahanan. Hal ini menjadi awal dari munculnya masalah bagi pekerja seks, pemerintah

¹⁷⁰ W. Roujanavong. 2012. *Human Trafficking: A Challenge to Thailand and the World Community*, 150th International Senior Seminar Visiting Experts Paper, Thailand.

mengadakan kegiatan pemberdayaan di tempat-tempat penahanan, jadi tidak ada kata sukarela dari pekerja seks untuk bergabung dengan pemberdayaan pemerintah. Kegiatan penggerebkan ini kemudian di beritakan oleh pihak pemerintah dan media, hal ini menjadi awal dari penyebab munculnya stigma dari masyarakat, penggerebkan ini bagi pekerja seks juga akan menghilangkan lapangan pekerjaan. Setelah penggerebkan pun pekerja seks tidak diberi kompensasi seperti pekerja di industri lain sesuai dengan Undang-undang perlindungan tenaga kerja tahun 1998, oleh sebab itu semua tindakan pemerintah tidak memberikan solusi bagi pekerja seks.

Penahanan untuk pekerja seks dinaungi oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand. Media menginformasikan tentang citra negatif industri seks dan juga memberitakan kondisi pekerja seks yang ditahan oleh pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah juga terus berusaha untuk memperbaiki kondisi penahanan untuk pekerja seks, seperti menahan anak-anak yang tidak memiliki kontak dengan keluarga saja. Mengadakan pelatihan keterampilan yang hasilnya dapat dipasarkan seperti menjahit. Memberikan pendidikan kepada anak-anak selama penahanan, namun setelah dibebaskan hal ini tidak dapat dilanjutkan.

Pada Februari tahun 2016, sebuah peraturan baru tentang imbalan finansial dan kompensasi diberlakukan, memungkinkan pemerintah untuk mencairkan imbalan finansial atau kompensasi sebesar \$ 846 - \$ 2.828 untuk orang-orang yang membantu penangkapan dan penuntutan perdagangan manusia. Anak-anak yang dieksploitasi di industri lain juga didukung untuk mengajukan klaim kepada majikan atas upah dan

kompensasi. Namun anak perempuan dan perempuan yang telah dieksploitasi di industri hiburan, mereka tidak berhak untuk mengklaim kompensasi atau uang yang terutang dari majikan sebagai prostitusi ilegal, seolah-olah itu meniadakan semua klaim keadilan. Gadis-gadis yang dibebaskan pada bulan April tahun 2017 dari penahanan di tempat penampungan hanya menerima \$ 100 untuk masing-masing. Permasalahan pekerja seks juga datang dari tempat penampungan, banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh petugas seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan tes HIV secara paksa. Bagi pekerja seks yang dikatakan sebagai tindakan penyelamatan oleh pemerintah ternyata tidak memberikan solusi bagi pekerja seks.

Dari sini pekerja seks membuat jaringan berbentuk *non-governmental organization* yang dikelola secara profesional seperti organisasi lainnya. Organisasi ini ditujukan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan pengakuan atas status pekerja seks sebagai pekerja legal. *Non-governmental organization* muncul dari bawah atau *grass root organization* berangkat dari individu, komunitas lokal, nasional, regional hingga global. Organisasi pekerja seks di Thailand bernama *Empower Foundation*, namun belum dirasa cukup jika hanya menjangkau nasional saja untuk memperjuangkan status pekerja seks sebagai pekerja legal, sebab pekerjaan ini tidak hanya ada di satu negara, selain itu masalah yang dialami oleh pekerja seks memiliki kesamaan di setiap negara. Organisasi pembela pekerja seks pun muncul di setiap negara, dari setiap negara akhirnya dibentuknya jaringan regional. Di kawasan Asia Pasifik jaringan pekerja seks bernama *Asia Pacific*

Network of Sex Workers (APNSW), yang menyuarakan suara pekerja seks di setiap negara anggota ke lingkup internasional sehingga setiap permasalahan pekerja seks mendapatkan perhatian yang sama dengan permasalahan masyarakat lain, selain itu juga agar pekerjaan seks mendapatkan pengakuan atas status pekerjaannya.

Jika dilihat dari perspektif liberalisme institusional menurut Joseph Nye JR. mengatakan bahwa liberalisme institusional berpendapat kerjasama dengan organisasi internasional dapat mengatasi suatu konflik sehingga dapat menghasilkan perdamaian.¹⁷¹ Sedangkan menurut Robert O. Keohane Peran institusi internasional sebagai penyedia informasi dan memperkuat harapan yang muncul mengenai kesolidan dari kesepakatan internasional.¹⁷² Disini yang dikatakan sebagai organisasi internasional adalah *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dan *Empower Foundation* bekerja untuk menjembantani pekerja seks serta menyelesaikan setiap masalah, namun keduanya memiliki jangkauan yang berbeda, *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) memberikan perhatian kepada pekerja seks di kawasan Asia Pasifik, jadi tidak hanya fokus pada satu negara saja, dukungan yang diberikan juga tidak berbasis proyek atau program melainkan advokasi. Liberalisme institusional berargumen bahwa setiap individu hidup di dunia yang sama maka memiliki tanggungjawab untuk setiap masalah meskipun tidak di negaranya. Sedangkan *Empower Foundation* adalah organisasi nasional pekerja seks asal Thailand yang

¹⁷¹ Joseph S. Nye, JR. 2002. *Power and Interdependence in the Trump Era*. Harvard University. <https://www.project-syndicate.org>. (diakses pada 3 Juli 2019).

¹⁷² Robert O. Keohane. 2012. *Twenty years of institutional liberalism*. DOI: 10.1177/0047117812438451/ <https://www.journals.sagepub.com>. (diakses pada 3 Juli 2019).

bergabung dengan *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW), *Empower Foundation* memiliki jangkauan hanya di lingkup nasional saja, dan langsung memberikan advokasi serta program untuk pemberdayaan pekerja seks di Thailand.

Organisasi tersebut menjadi jawaban dari konflik yang selama ini terjadi antara pihak pemerintah Thailand dan pekerja seks, yang mana pekerja seks merasa adanya ketidakadilan antara mereka dengan masyarakat lainnya. Beberapa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat lainnya berbeda dengan yang didapatkan pekerja seks seperti akses layanan kesehatan, diskriminasi, pendidikan, perlindungan hukum, fasilitas interaksi sosial, dan partisipasi politik. Dalam lingkup pekerjaan, pekerja seks juga merasakan adanya perbedaan dengan profesi lain, yang mana tidak semua hak pekerja didapatkan dalam pekerjaan seks, apalagi status ilegal yang diberikan sejak lama serta digolongkan dalam tindakan kriminal mengharuskan pekerjaan seks di anggap sebagai penjahat segala sesuatu terkait aktivitas industri seks harus ditangani secara hukum.

Dukungan yang terlihat dari *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) adalah membawa suara pekerja seks nasional agar lebih mendapatkan perhatian oleh seluruh masyarakat dunia, sehingga pekerja seks keberadaannya di pertimbangkan dan diakui status pekerjaannya secara legal melalui advokasi-advokasi baik itu di lingkup regional maupun internasional. Sedangkan organisasi nasional pekerja seks di Thailand yang bernama *Empower Foundation* memiliki proyek pemberdayaan atau program-program secara langsung kepada pekerja seks di Thailand, dengan tujuan

untuk memenuhi kebutuhan pekerja seks dan untuk memperbaiki kondisi kehidupan setidaknya di mana suatu saat pekerja seks diterima sebagai pekerja dan pekerja seks dapat bekerja dengan aman, bebas dari stigma, dan kriminalisasi. Jika aktivitas dari *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) adalah advokasi dilingkup regional Asia Pasifik untuk memperjuangkan pengakuan atas status pekerja seks sebagai pekerja legal, sedangkan *Empower Foundation* memiliki program pendidikan, konseling, dan advokasi hukum individu dan negara untuk meningkatkan kondisi kerja menjadi lebih baik.

Dari semua usaha yang dilakukan saat ini oleh jaringan pekerja seks baik itu dari *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) maupun *Empower Foundation*, bahwasanya pemberantasan atas aktivitas industri seks tetap ada apalagi Thailand sedang mengerjakan proyek pembangunan sektor pariwisata dan menerapkan pariwisata halal menjadi salah satu bagian dari program paket pariwisata, sedangkan industri seks sering ada didalam industri hiburan dan memanfaatkan fasilitas sektor pariwisata dan perjalanan untuk melakukan aktivitas, oleh sebab itu pihak pemerintah Thailand juga sangat memperhatikan hal tersebut, hal ini tidak hanya dilakukan sendirian melainkan berkolaborasi baik itu dengan aparat kepolisian, pelaku pariwisata, agen perjalanana, pihak perhotelan, dan bahkan pihak luar baik itu badan khusus menangani tindakan prostitusi yang disamakan dengan eksploitasi seksual maupun dengan pihak organisasi internasional. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa pembasmian akan industri seks tetap ada, namun organisasi pekerja seks juga

tetap berusaha mengelola dan mempertahankan organisasi pekerja seks agar tetap ada meskipun mendapatkan banyak penyerangan.

Dari peristiwa ini terlihat peran dari *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) menerapkan liberalisme institusional yakni dengan melibatkan organisasi nasional atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) pekerja seks untuk aktif dalam segala bentuk usaha untuk mewujudkan pengakuan atas pekerja seks sebagai pekerja legal. Di Thailand ada organisasi nasional untuk pekerja seks yang memang terlebih dahulu terbentuk dari pada *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW), namun organisasi nasional ini juga ikut bergabung dengan jaringan advokasi regional sebagai bentuk interkasi dengan jaringan internasional, organisasi ini bernama *Empower Foundation*. Dengan adanya kolaborasi antara pihak nasional dan internasional maka semakin menguatkan industri seks untuk mempertahankan keberadaannya dan tetap menjalankan organisasinya.

Dari sini dapat dilihat bahwasanya kasus ini telah memenuhi persyaratan liberalisme institusional yang mengatakan organisasi internasional dapat mengatasi suatu konflik sehingga dapat menghasilkan perdamaian. Organisasi internasional terlihat dari hubungan antara *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dan *Empower Foundation* meskipun lingkup jangkauan kerja berbeda namun keduanya memiliki misi yang sama yakni memperjuangkan pengakuan atas pengakuan status pekerja seks sebagai pekerja legal. Hukungan tersebut dalam teori liberalisme institusional dijelaskan untuk mengatasi suatu konflik yakni telah peneliti jelaskan

sebelumnya bahwasanya konflik terjadi antara pekerja seks dengan pemerintah dan masyarakat anti-perdagangan manusia, dimana pekerja seks dianggap sebagai patologi sosial dan mendapatkan batasan-batasan untuk beraktivitas. Selanjutnya dalam liberalisme institusional dengan kerjasama suatu organisasi internasional dalam mengatasi suatu konflik sehingga terciptanya suatu perdamaian, untuk industri seks hingga saat ini masih adanya masalah yang dihadapi karena pekerjaan seks beresiko besar serta rentan mendapatkan kejahatan. Namun, organisasi pekerja seks tetap ada dan pekerja seks tetap mempertahankan keberadaan industri dan organisasi untuk pekerja seks.

Organisasi internasional yakni *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) telah berperan dalam meredam konflik antara pekerja seks dengan pemerintah dan masyarakat. Namun, konflik antara pekerja seks dengan pemerintah tidak benar-benar hilang sebab hingga saat ini stigma, diskriminasi, bahkan penggerebekan oleh pihak pemerintah masih terjadi. Selain itu, hingga saat ini status ilegal pada pekerja seks masih berlaku, yang mana tetap membuat pekerja seks menjadi suatu kejahatan atau tindakan kriminal yang harus di tangani secara hukum. Meskipun begitu, paling tidak konflik yang dialami pekerja seks dapat diredakan. Bahkan saat ini tidak hanya pekerja seks yang memakai busana mini, banyak wisatawan asing atau seseorang dengan profesi lain yang berkunjung di Thailand dengan memakai busana mini, oleh sebab itu saat ini pandangan terhadap cara

berpakaian juga tidak terlalu menjadi fokus utama dalam penilaian negatif dari masyarakat.

Serta dari organisasi nasional untuk pekerja seks sendiri yaitu *Empower Foundation* yang juga merupakan anggota dari *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) membantu pekerja seks mendapatkan akses layanan masyarakat seperti pendidikan, diskusi kesehatan, pembelajaran bahasa Inggris, dan memberikan informasi yang dibutuhkan pekerja seks. Oleh sebab itu, tujuan dari adanya organisasi *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dan *Empower Foundation* untuk memperbaiki kondisi pekerja seks dikemudian hari serta agar posisi pekerja seks sama dengan masyarakat lain atau profesi lain, dengan mendapatkan pengakuan sebagai pekerja legal sehingga juga mendapatkan hak asasi manusianya.

Adanya organisasi ini sebagai jawaban dari konflik yang terjadi pada pekerja seks dan pemerintah Thailand, yang mana bertujuan untuk mendamaikan antara keduanya sehingga pekerja seks mendapatkan pengakuan atas status sebagai pekerja legal di Thailand. Bentuk perdamaannya adalah pengakuan atas status pekerja seks sebagai pekerja legal dan penghormatan hak asasi manusia (HAM), yang mana hak asasi manusia adalah fokus dari liberalisme. Sebuah perspektif yang menguatkan nilai kebebasan adalah cara berpikir liberalisme. Disini organisasi *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) dan *Empower Foundation* sebagai liberalisme yang mana mengakui atas kehormatan dan kebebasan pekerja seks, dengan cara membantu pekerja seks untuk mendapatkan segala haknya.

Menurut teori liberalisme yang sangat mengutamakan nilai kebebasan, bahwa setiap manusia dapat memilih pilihan dalam hidupnya begitupun pilihan terkait profesi. Tetapi untuk pekerja seks, profesi ini mendapatkan batasan-batasan dalam bekerja, karena tidak mendapatkan pengakuan atas status pekerjaannya sebab pekerja seks dianggap sebagai penyakit masyarakat yang tergolong dalam tindak kejahatan. Dari sini terlihat kalau pekerja seks jauh mendapatkan hak asasi manusia yang seharusnya didapatkan oleh manusia, menurut perspektif liberalisme. Namun, hak asasi manusia menurut kaum liberal memiliki sedikit perbedaan dengan hak asasi manusia dalam Islam.

Hak asasi manusia menurut Islam adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Bahkan al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia, hak asasi manusia dalam Islam merupakan standar normatif yang ditetapkan Allah atau dibuat manusia berdasarkan firman Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, jadi hak asasi manusia tetap adanya batasan yaitu hak asasi manusia lainnya pula. Konsepsi tentang hak asasi manusia dalam Islam dapat dijumpai dalam sumber utama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun pelaksanaannya atau implementasinya dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sebutan Sunnah. Beberapa hak asasi manusia dalam Islam yang meliputi hak hidup, hak keadilan, kebebasan berfikir dan berpendapat, dan hak bekerja. Di dalam hak asasi manusia menurut Islam juga adanya jaminan atas kehidupan privasi setiap

pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk pekerja seks laki-laki dan transgender. Berikutnya Can Do Bar yakni suatu bar milik *Empower Foundation*, merupakan model bantuan pembangunan dan penyelamatan untuk menjauhkan pekerja seks dari tindakan penyelamatan lain yang tidak diinginkan. Kemudian untuk antisipasi penularan HIV/AIDS, Thailand ikut menerapkan *100% Condom Use Programme* (CUP).

Kedua, *Asia Pacific Network of Sex Workers* (APNSW) tidak mendukung dari segi materi namun dari segi kemanusiaan seperti himbauan yang digunakan untuk pengembangan organisasi dan pemberdayaan pekerja seks, sedangkan *Empower Foundation* memberikan dukungan berupa materi dan kemanusiaan, terlihat dari memberikan program langsung kepada pekerja seks di Thailand seperti pendidikan, dukungan kesehatan, dan advokasi. *Empower Foundation* aktif di Bangkok dan Chiang Mai, di Bangkok mengelola museum bernama *This is Us* yang berisikan sejarah prostitusi di Thailand. Sedangkan di Chiang Mai mengelola sebuah bar bernama *Can Do Bar* yang berdiri sejak tahun 2006, *Can Do Bar* berbeda dengan bar lainnya, *Can Do Bar* dapat dikatakan sebagai satu-satunya di dunia bar yang aman bagi pekerja seks, karena daya tarik utama *Can Do Bar* bukan menjual seks tetapi memberikan contoh kepada publik untuk menciptakan tempat yang aman bagi pekerja seks serta memperjuangkan martabat pekerja seks, di lantai kedua *Can Do Bar* berfungsi sebagai ruang seni dan area pendidikan dengan nuansa yang

- Empower Foundation. 2016. *Moving Toward Decent Sex Work: Sex worker community research decent work and exploitation in Thailand*. (Nonthaburi: Empower University Press).
- Gabriel, Jurg Martin. 1994. *Worldviews and Theories of International Relations*, Palgrave.
- Harsono, Hanifah, 2002, *Implementasi kebijakan dan politik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Jill Steans, Llyod Pettiford, Thomas Diez, Imad El-Anis. 2010. *An introduction to international relations theory: perspectives and themes*. (New York: Pearson Longman).
- Jemadu, Aleksius. 2008, *Politik Global dalam Teori & Praktik*, (Surabaya: Graha Ilmu).
- Jackson, R., & Sorensen, G. 1999, *Introduction to International Relations*, (Oxford University Press).
- J.M. Grieco. 1988. *Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*. <http://www.jstor.org/stable/2706787>. *International Organization*, Vol.42, No.3.
- Koentjoro, 2004. *On The Spot: tutur dari sarang pelacur*. (Yogyakarta: Tirta). Dalam Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti. *Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) di kawasan stasiun kereta api Kutoarjo, kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:K7yiJE2NaykJ:journ>

- Maulida Nila Cahyaning Widhi, *Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand. Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 4, 2018, hal 730-738. Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>. (Semarang: FISIP, Universitas Diponegoro).*
- Raesa Oktavia. *Upaya United Nations World Tourism Organization (UNWTO) menangani sex tourism di Thailand (2009-2013).* <https://Jom.Unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/5152/5032> (accessed Desember 15, 2018).
- Robert O. Keohane. 2012. *Twenty years of institutional liberalism.* DOI: 10.1177/0047117812438451/ <https://www.journals.sagepub.com>. (diakses pada 3 Juli 2019).
- Rebekka Friedman, *et al*, *After Liberalism? The Future of Liberalism in International Relations*, (Palgrave Macmillan).
- Shilu Manandhar. *In Nepal, sex trade thrives in transport hubs.* <https://www.globalpressjournal.com> (diakses pada 20 Juni 2019).
- Sandra Neuman. *Female Prostitution in Thailand - looked upon a victim-agent framework* .2012. School of Social Sciences. Department of Peace and Development Studies 2FU31E Bachelor Thesis. Linnaeus University.
- Vinsensio Dugis. 2016. *Teori Hubungan Internasional, Perspektif-perspektif klasik.* (Surabaya: Airlangga University).

- Berita Taiwan. 2015. *Maraknya bisnis prostitusi wanita Asing di Taiwan*.
<https://www.majalah-holiday.com> (diakses pada 18 Juni 2019).
- Harwanto Bimo Pratomo. 2015. *Intip bisnis prostitusi Sydney cetak miliaran dolar pemasukan negara*. <https://www.m.merdeka.com> (diakses pada 19 Juni 2019).
- Japan Info. *Tetap aman di gemerlap kehidupan malam Tokyo! Mengintip bisnis prostitusi dan sisi gelap Tokyo*. 2018. <https://www.jpinfo.com> (diakses pada 23 Juni 2019).
- Muhaimin, 2016. *Menteri Pariwisata Thailand Ingin Lenyapkan Wisata Seks*.
<https://international.sindonews.com/read/1124020/40/menteri-pariwisata-thailand-ingin-lenyapkan-wisata-seks-1468736953>. (diakses pada 22 April 2019).
- Palash Ghosh. *South Korea: A Thriving sex industry in a powerful, wealthy super-state*. 2013. <https://www.ibtimes.com>. (diakses pada 20 Juni 2019).
- Rdf/fay. 2010. *Wanita Korea Utara dijual US \$ 1.500 di China*.
<https://www.m.detik.com>. (diakses pada 20 Juni 2019).
- Soaman Dizechi, Carinne Brody. 2018. *Youth Paying for sex: what are the associated factors? Finding from a cross-sectional study in Cambodia*.
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov>. (diakses pada 27 Mei 2019).
- Tariff PSK di Malaysia tergantung pendidikannya, sarjana minimal segini per jam*. 2019. <https://www.bangka.tribunnews.com> (diakses pada 28 Mei 2019).

- Monruedee Jansuttipan. 2016. *Inside the Bangkok museum dedicated to Thai sex workers*.<https://bk.asia-city.com/city-living/news/bangkok-this-is-us-museum-thai-sex-workers>. (diakses pada 3 Juli 2019).
- Mathew Dearnaley. 2003. *New Zealand, Price of sex likely to rise*.
<https://www.nzherald.co.nz> (diakses pada 22 Juni 2019).
- Mohammad Ryan Bakry, FH UI, 2010. *BAB II Konsep hak asasi manusia*.
<https://www.lib.ui.ac.id>.
- Metopen, *pengertian penelitian deskriptif kualitatif*. 2016. <https://digilib.unila.ac.id>.
(Accessed March 15, 2019).
- NSWP. *Sex Workers Demonstrate Economic and Social Empowerment. regional Report: Asia and the Pacific*. (The Matrix, 62 Newhaven Road Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB) secretariat@nswp.org www.nswp.org.
- NSWP. 2012. *UNAIDS Guidance Note on HIV and Sex Work and Annexes 2012*.
<http://www.nswp.org/resource/unaidsguidancenotehivandsexworkandannexes-2012>. (diakses pada 28 Juni 2019).
- Online Burma, Myanmar Library. 2010. *downward spiral in Jiegao (story and photos)*. <https://www.burmalibrary.org> (diakses pada 17 Juni 2019).
- Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia. dalam Ria, 2016. *Awas salah memahami prostitusi sebagai TPPO*.
<https://www.hukumonline.com>. (diakses pada 28 Mei 2019).

